

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

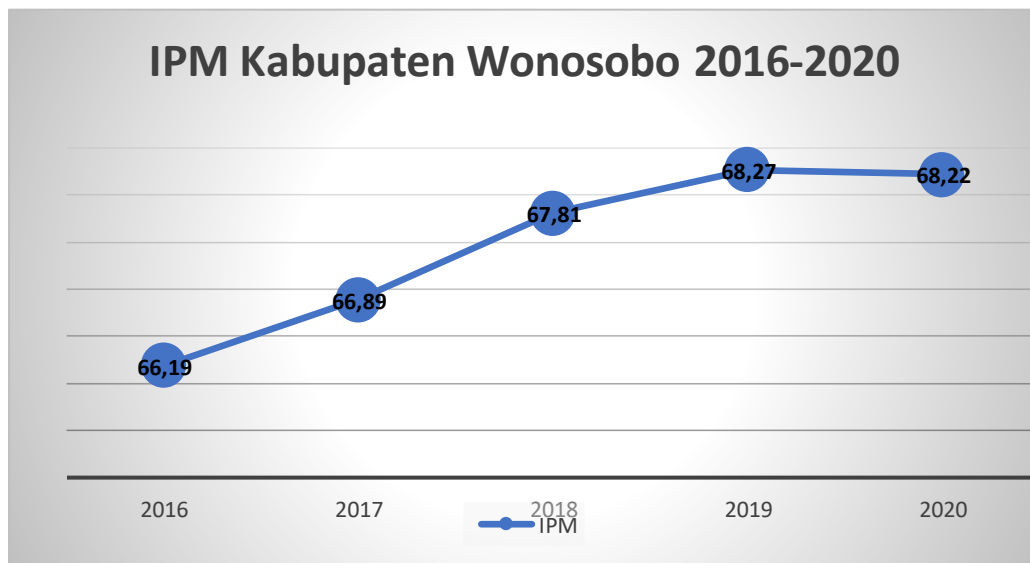
**Tabel II. 1 Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,27	68,22
2	Angka Kemiskinan	16,63%	17,36%
3	Angka Pengangguran	3,47%	5,37%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,61%	-1,66%
5	PDRB Per Kapita	23,85%	23,77%
6	Distribusi Pengeluaran	17,85%	18,76%

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2021

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks ini dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan indeks komposit (gabungan) hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup.



(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2020)

Gambar II. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016- 2020

Perubahan nilai IPM di Kabupaten Wonosobo dari gambar diatas menunjukkan bahwa nilai dari komponen penilaian IPM terus membaik sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Komponen tersebut diantaranya Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah serta Pengeluaran perkapita Disesuaikan. Keempat komponen tersebut menunjukkan perubahan nilai menuju nilai yang lebih baik pada tahun sampai tahun 2019, seiring dengan tingkat pembangunan fisik dan non-fisik yang terdapat di Kabupaten Wonosobo. Nilai perkembangan nilai per komponen dalam penilaian IPM tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II. 2 Perkembangan IPM Wonosobo Menurut Komponen Tahun 2016- 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,16	71,3	71,46	71,60	71,82
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,67	11,68	11,69	11,74	11,75
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,12	6,51	6,75	6,76	6,81
Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP)	Rp(000)	9,880	9,970	10,500	10,870	10,621
IPM	Angka	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22
Pertumbuhan IPM	%	0,49	0,7	0,92	0,46	-0,05

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2020

Secara umum IPM Tahun 2020 mengalami penurunan walaupun pada beberapa komponen cenderung naik. Angka Harapan Hidup 71,82 yang memiliki arti bahwa anak yang lahir di tahun 2020 akan dapat bertahan hidup sampai umur 71-72 tahun. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah 11,75 yang memiliki arti bahwa anak berumur 7 tahun yang masuk sekolah formal pada tahun 2020 memiliki harapan dapat sekolah hingga jenjang SMA (arti dari nilai 11,75).

Tabel II. 3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan IPM
1	Kabupaten Magelang	67,85	68,39	69,11	69,97	69,87	2,02
2	Kota Magelang	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99	1,83
3	Kabupaten Purworejo	70,66	71,31	71,87	72,50	72,68	2,02
4	Kabupaten Temanggung	67,6	68,34	68,83	69,56	69,57	1,97
5	Kabupaten Kebumen	67,41	68,29	68,8	69,60	69,81	2,4
6	Kabupaten Wonosobo	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22	2,03
Provinsi Jawa Tengah		69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	1,89

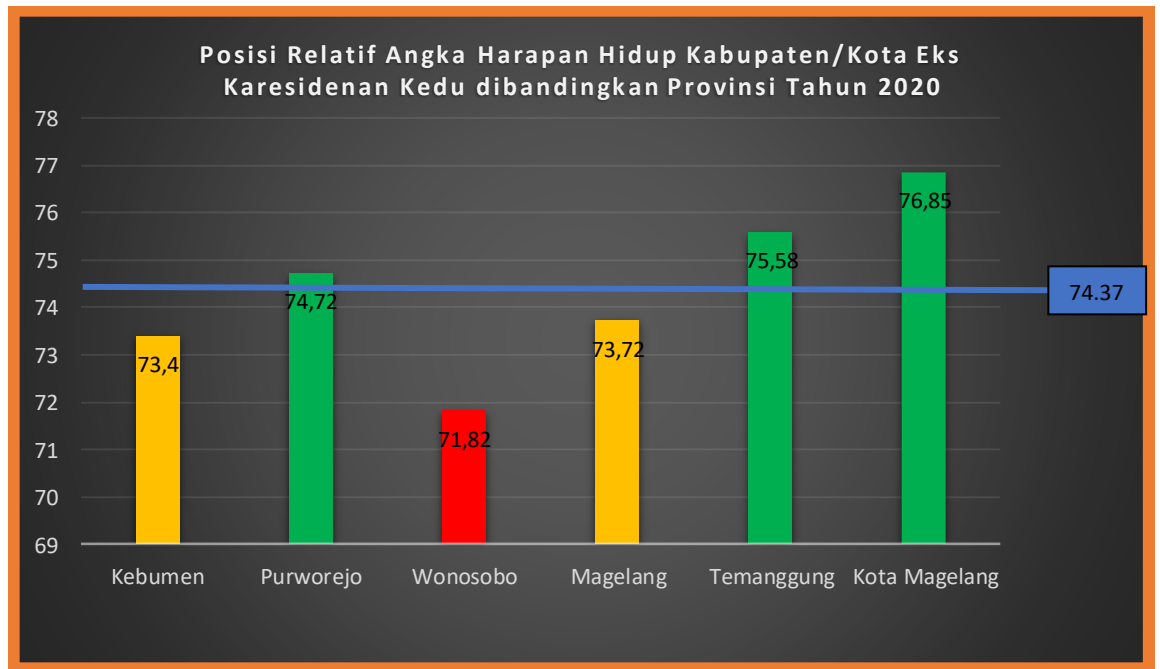
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah)

Dibandingkan dengan kabupaten/ kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, nilai IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 berada di urutan ke 6 terendah dan jauh di bawah rata-rata IPM Provinsi Jateng. Namun demikian pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan provinsi.

Gambaran lebih detil tentang IPM akan dijelaskan melalui komponen angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan dari 71,60 pada tahun 2019 menjadi 71,82 pada tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan pada tahun 2020 dapat bertahan hidup hingga usia 71-71 tahun. Pada tahun 2020 Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Angka Harapan Hidup tertinggi adalah Kota Magelang (76,85) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (71,82).

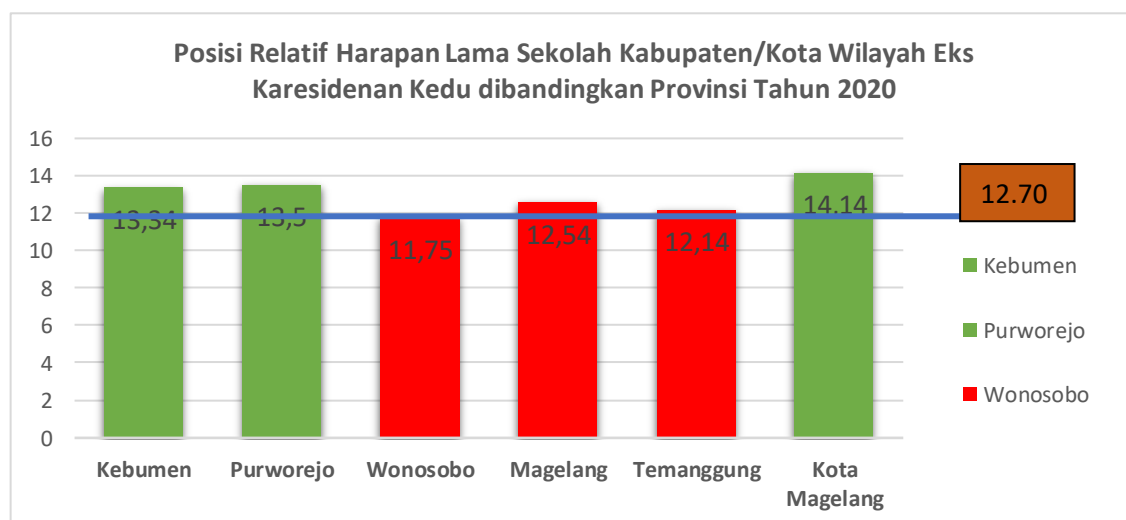


(Sumber : BPS Prov Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 2 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2020

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.



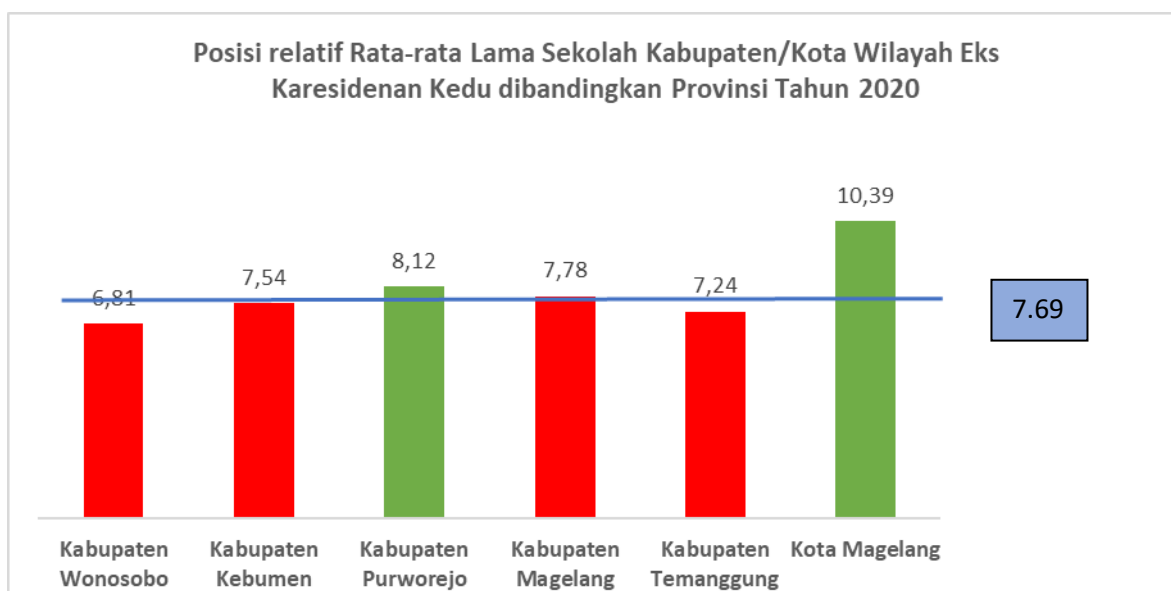
(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 3 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2020

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar 11,75 Tahun. Nilai tersebut masih dibawah nilai provinsi pada tahun 2020 sebesar 12,70 Tahun. Nilai Harapan Lama Sekolah 11,75 tahun mempunyai arti bahwa anak usia 7 tahun pada tahun 2020 di Kabupaten Wonosobo hanya memiliki peluang untuk sekolah sampai ke jenjang SMA di saat anak-anak di kabupaten lain setidaknya berpeluang sekolah sampai dengan perguruan tinggi.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah dari kurun waktu 2016-2020 semakin meningkat dari 6,12 tahun menjadi 6,81 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Wonosobo memiliki pendidikan tertinggi sampai kelas 1 SMP (kelas 7).



(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 4 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2020

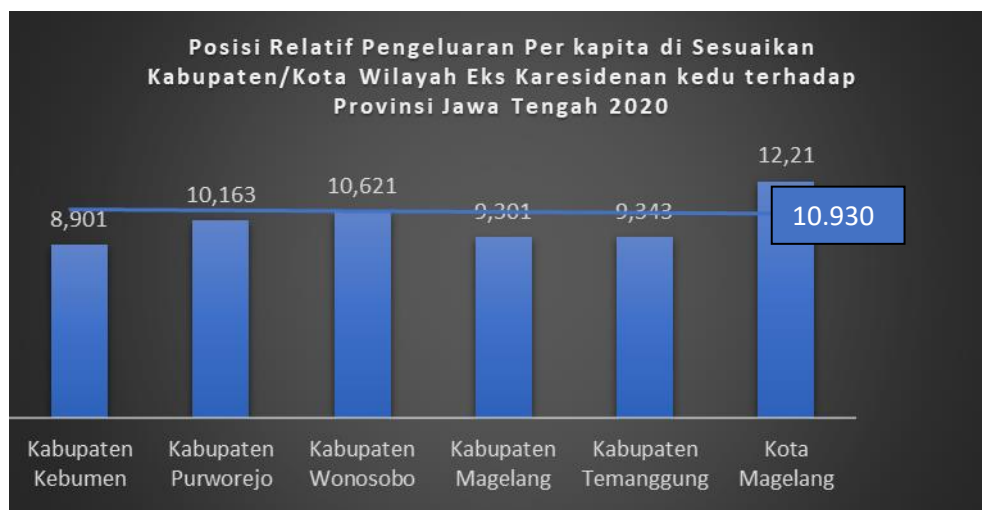
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan daerah lain di eks-Karesidenan Kedu memiliki nilai yang paling rendah. Nilai tersebut juga dibawah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Nilai rata-rata lama sekolah tertinggi di eks-Karesidenan Kedu berada di Kota Magelang dengan nilai 10,39 atau setingkat kelas 1 SMA (Kelas 10).

4. Pengeluaran Per Kapita disesuaikan

Standar hidup layak menjelaskan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan

untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.

Pengeluaran per-kapita di sesuaikan di Wonosobo meningkat dari Rp9.877 juta pada tahun 2016 menjadi Rp10,62 juta pada tahun 2020. Walaupun angka pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 10,870 juta. Pengeluaran per Kapita ini masih dibawah dengan Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Tengah yang bernilai Rp10.930 juta.



(Sumber: BPS Prov Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 5 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

B. ANGKA KEMISKINAN

Pengukuran angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

1. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan karena adanya pandemic Covid-19. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Wonosobo sebanyak 160,1 ribu jiwa dan pada tahun 2019 turun hingga menjadi 131,3 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 137,6 ribu jiwa.



(Sumber: BPS Kab Wonosobo, 2020)

**Gambar II. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa)**

Perkembangan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonosobo jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Karesidenan Kedu, Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ke 3 tertinggi, lebih rendah dari Kabupaten Kebumen dan lebih tinggi dari Kabupaten Purworejo, secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.4.

Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Miskin di Karesidenan Kedu Tahun 2015-2020

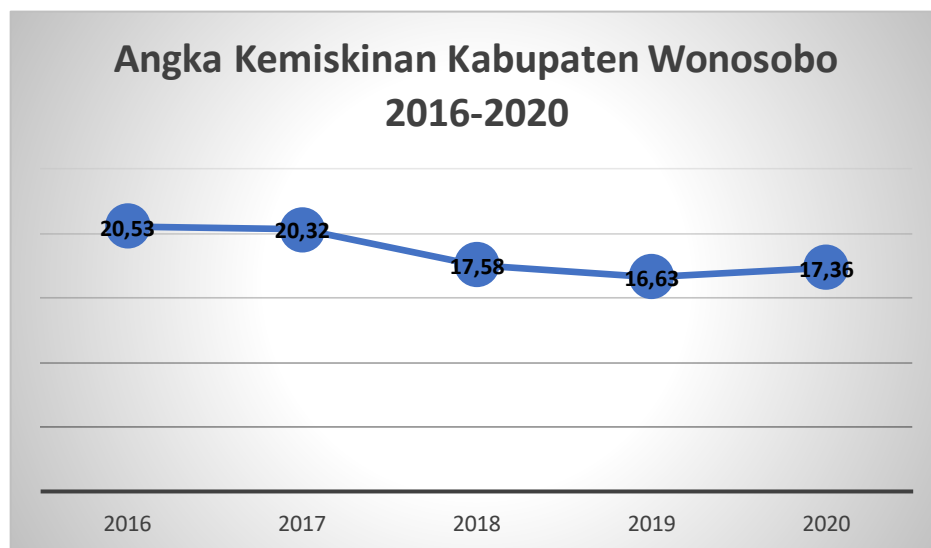
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Magelang	158,9	157,2	143,4	137,4	146,3
2	Kota Magelang	10,6	10,6	9,6	9,1	9,3
3	Kabupaten Purworejo	99,1	98,6	83,5	82,2	84,8
4	Kabupaten Temanggung	87,1	86,8	75,4	72,6	77,3
5	Kabupaten Kebumen	235,9	233,4	208,7	201,3	211,1

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Kabupaten Wonosobo	160,1	159,2	138,3	131,3	137,6
Provinsi Jawa Tengah		4506,9	4450,7	3897,2	3743,23	3980,90

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2020)

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Berbeda dengan gambar II.7, Gambar II.8 menjelaskan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo, tahun 2020 Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke-34 atau naik 1 peringkat.



(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020)

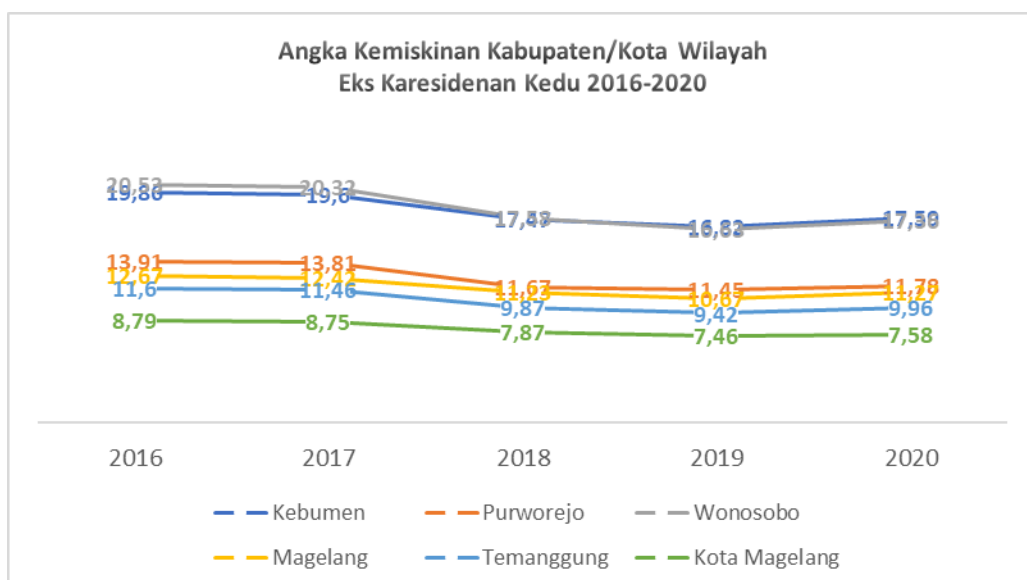
Gambar II. 7 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020



(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2020)

Gambar II. 8 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Posisi persentase kemiskinan di eks-Karesidenan Kedu dengan melihat Gambar II.8 menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo berurutan dengan nilai 17,59% dan 17,36%. Karesidenan Kedu memiliki tiga Kabupaten yang nilai persentase kemiskinannya berada dibawah nilai persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Kab. Magelang, Kab. Temanggung dan Kota Magelang).



(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2020)

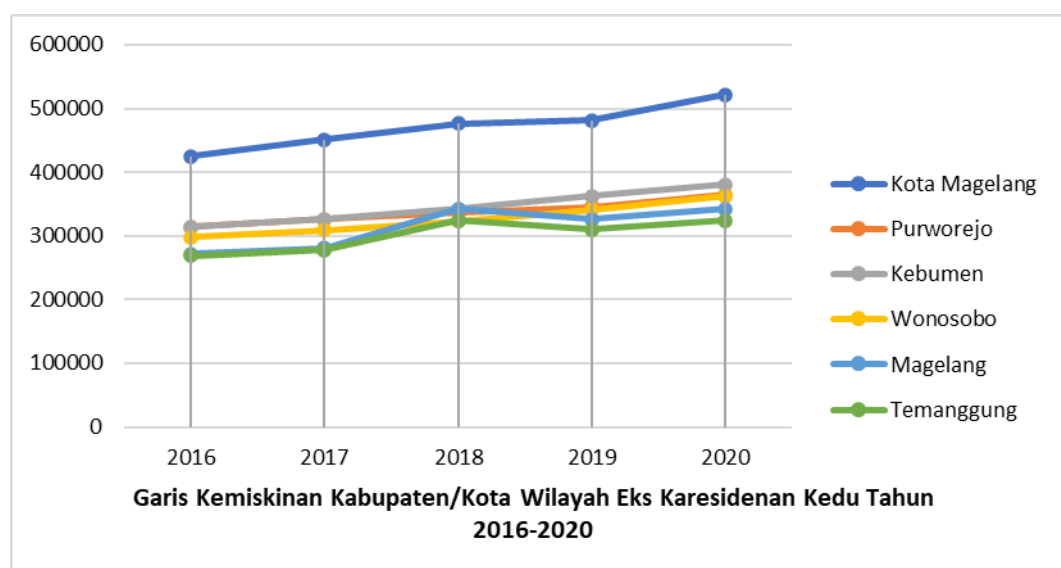
Gambar II. 9 Presentase Angka Kemiskinan Kabupaten/ Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Perkembangan angka kemiskinan di kabupaten/kota wilayah eks Karesidenan Kedu cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Kinerja penurunan tertinggi adalah Kabupaten Wonosobo dengan penurunan sebesar 3,17% selama kurun waktu 2016-2020 (walaupun sempat meningkat pada tahun 2020). Tingginya kinerja penurunan kemiskinan ini, berdampak positif dengan meningkatnya status peringkat kemiskinan dari peringkat 35 menjadi peringkat 34 di tingkat Provinsi Jawa Tengah menggeser posisi Kabupaten Kebumen yang turun peringkat mejadi 35.

Gambar II.9 juga menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antar kabupaten/kota yang sudah memiliki nilai persentase kemiskinan satu digit (Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang) dengan kabupaten dengan persentase tertinggi. Ketimpangan antar kabupaten/kota mencapai angka 9,17%. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan antar kabupaten/kota, nilai sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

3. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM terdiri dari paket komoditi kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan GKNM merupakan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan yang diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Gambar II.10



(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami kenaikan. Garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mengalami peningkatan 5,36 persen dibanding dengan tahun 2020, yaitu menjadi sebesar Rp362.683. Tren garis kemiskinan selalu meningkat seiring dengan laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

Nilai dari Garis Kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (makan maupaun non-makanan) sesuai dengan taraf kehidupan layak maka harus memenuhi angka Garis Kemiskinan. Contohnya untuk Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Garis Kemiskinan diangka Rp 362.683,00/org, jika dalam sebuah keluarga terdapat 4 anggota keluarga maka keluarga tersebut untuk dapat hidup layak di Kabupaten Wonosobo harus mengeluarkan biaya hidup Rp1.450.732,00.

Jika keluarga tersebut tidak memenuhi nilai tersebut, maka termasuk dalam keluarga miskin di Kabupaten Wonosobo.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin.



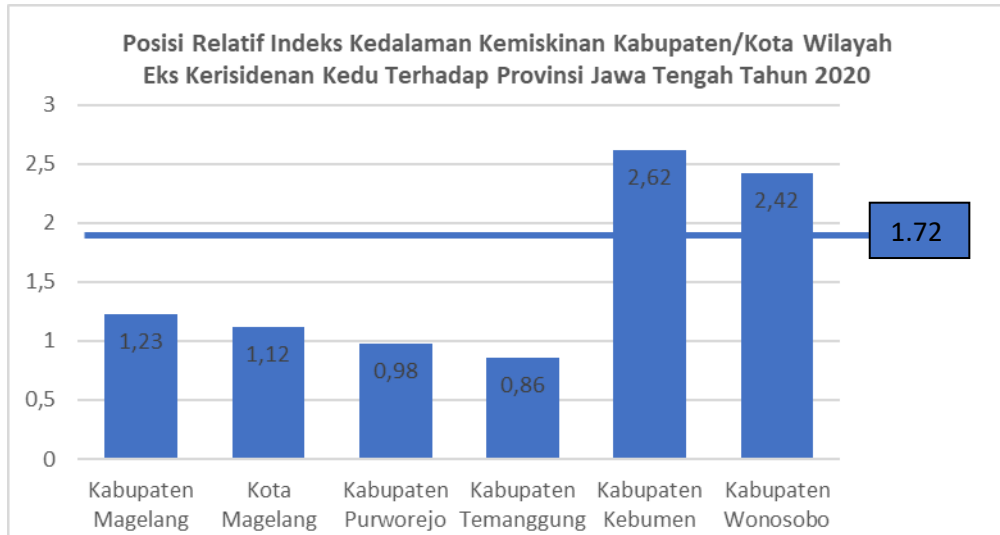
(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dari 4,02 menjadi 2,42 pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, gap antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran

penduduk miskin masih tinggi dan memerlukan usaha yang keras untuk dapat menaikkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin melampaui garis kemiskinan.

Meskipun mengalami penurunan, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 masih lebih tinggi 0,7 poin dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan 5 kabupaten/kota eks-Karesidenan Kedu, Kabupaten Kebumen memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 2,62 dengan selisih 0,2 dibandingkan Kabupaten Wonosobo.

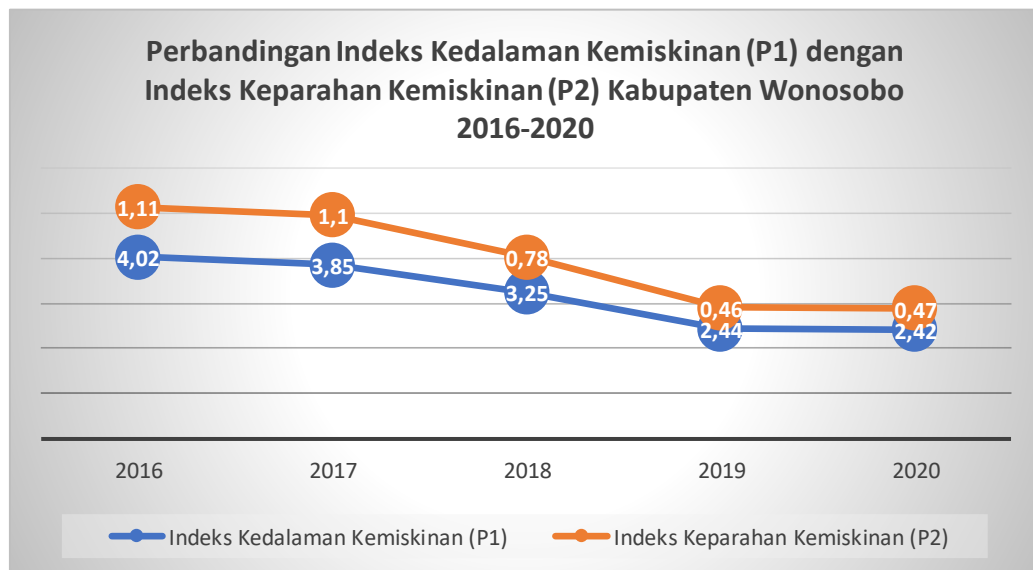


(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 12 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 1,6 pada tahun 2016 menjadi 0,46 pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2020)

Gambar II. 13 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo 2016-2020

Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan selama 5 tahun terakhir relatif menurun, meskipun mengalami kenaikan tidak signifikan pada tahun 2020. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mendekati angka nol yang artinya semakin rendah kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan, turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga bersamaan dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin dan semakin mendekatnya gap atau ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Kondisi Indeks Keparahan di Karesidenan Kedu dapat dilihat pada Tabel II.5 dibawah ini.

Tabel II. 5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (dalam persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Magelang	0,44	0,31	0,34	0,17	0,20
2	Kota Magelang	0,23	0,32	0,21	0,19	0,23
3	Kabupaten Purworejo	0,76	0,54	0,36	0,1	0,12
4	Kabupaten Temanggung	0,39	0,43	0,29	0,05	0,11
5	Kabupaten Kebumen	1,11	0,99	0,55	0,65	0,55

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (dalam persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Kabupaten Wonosobo	1,11	1,1	0,78	0,46	0,47
	Provinsi Jawa Tengah	0,63	0,57	0,45	0,3	0,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah)

C. ANGKA PENGANGGURAN

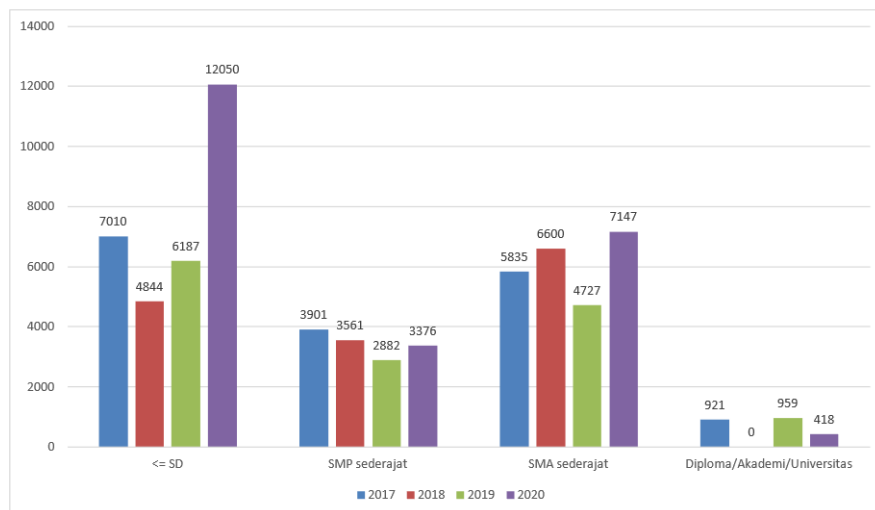
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.



(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2020)

Gambar II. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 merupakan TPT tertinggi yang diproyeksikan memiliki nilai sebesar 5,37%. Mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Sempat mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 3,43%. Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap kenaikan angka TPT pada tahun 2020 ini, selama masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.



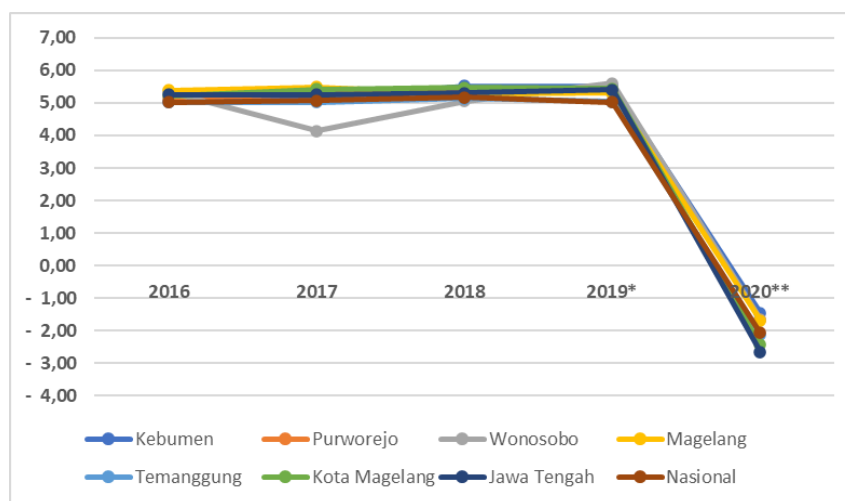
(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Gambar II. 15 Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2020

Pada tahun 2020, TPT naik sebesar 5,37 dengan dominasi penganggur pada tingkat pendidikan SD, tidak tamat SD dan bahkan belum pernah sekolah.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi pertumbuhan ekonomi seluruh daerah menurun selama pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo sendiri turun sebesar -1,66 %. Angka ini masih dibawah angka penurunan di tingkat Jawa Tengah -3,34% & dan di tingkat nasional sebesar -2,07%.

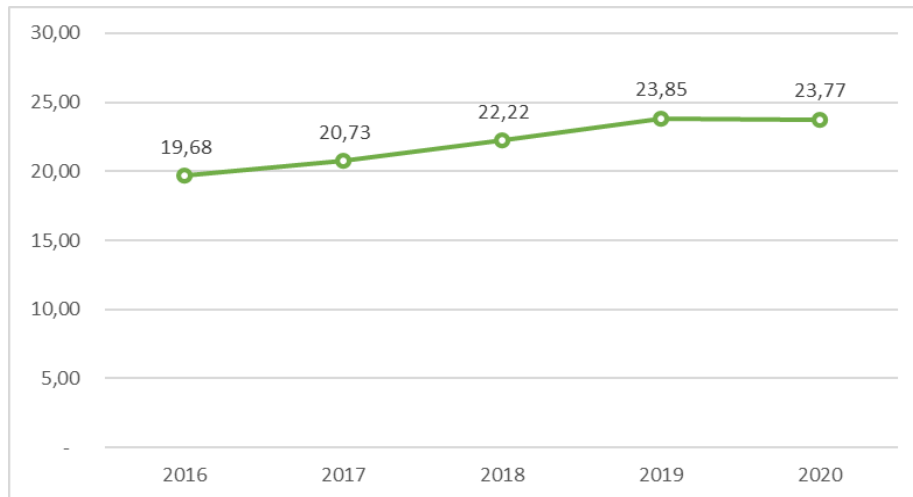


(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Gambar II. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi dan Nasional Tahun 2020

E. PENDAPATAN PER KAPITA

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2016 sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2021)

Gambar II. 17 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2020

PDRB perkapita pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,08% meski tidak signifikan. Berbanding terbalik dengan kondisi PDRB perkapita tahun 2019 yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Angka PDRB riil per kapita dapat menjadi indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

F. DISTRIBUSI PENGELUARAN

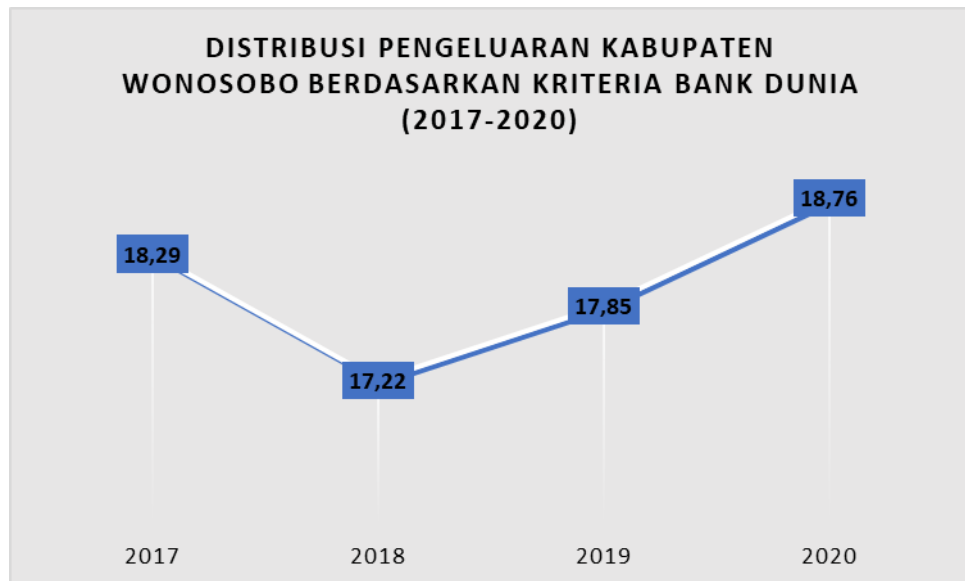
Secara nasional, nilai Gini Ratio Indonesia selama periode Maret 2013–September 2014 mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan pada periode Maret 2015 hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015–Maret 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai Gini Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020.

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

- ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen;
- ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen;
- serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen;

BPS Wonosobo tidak melakukan perhitungan Gini Ratio pada tahun 2020, akan tetapi ketimpangan tersebut dapat dilihat dari data distribusi pengeluaran tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar II. 18 Distribusi Pengeluaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2020

Pada tahun 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,76 persen (di atas 17 persen) yang berarti Wonosobo berada pada kategori ketimpangan rendah.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator kinerja kunci masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Indikator kinerja kunci tersebut dituangkan dalam jenis indikator kinerja kunci keluaran dan indikator kinerja kunci hasil yang disajikan pada setiap urusan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

A. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel II. 6 Indikator Kinerja Keluaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	171	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	25.626	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Perlengkapan dasar (6 buku gambar per semester dan 1 set alat mewarnai per semester) diperoleh melalui APBN BOP PAUD (DAK Non Fisik)
		3	Jumlah Peserta Didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.499	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.830	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru pendidikan anak usia dini	1.540	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah.	739	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	789 Kepala Sekolah pada jenjang PAUD (KB, SPS, TK, RA) sudah memiliki ijazah S1/D-IV tetapi belum di diklat calon kepala sekolah pada jenjang PAUD formal dan Nonformal.
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi.	694	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	69.147	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Perlengkapan dasar peserta didik (1 paket modul belajar dan 1 set perlengkapan belajar) dari Alokasi Dana BOS
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	29.259	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Perlengkapan dasar peserta didik (1 paket modul belajar dan 1 set perlengkapan belajar) dari Alokasi Dana BOS
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	25.519	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penerima Bantuan PIP SD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	11.218	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penerima Bantuan PIP SMP
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).	5.127	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).	2.111	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.	4.616	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).	2.511	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).	1.114	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).	576	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	674	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).	505	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	4.780	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	2.236	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	523	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	132	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.	326	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.	433	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).	16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.096	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Perlengkapan dasar peserta didik (1 paket modul belajar dan 1 set perlengkapan belajar) dari anggaran APBN melalui BOP Pendidikan Kesetaraan
		29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Penerima PIP Pendidikan Kesetaraan
		30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).	298	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).	239	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).	220	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		33	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1.	18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.	3	Dinas Kesehatan	RSUD Setjonegoro, RSI Wonosobo, PKU Muhamadiyah Wonosobo
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	Dinas Kesehatan	RSUD Setjonegoro, RSI Wonosobo, PKU Muhamadiyah Wonosobo
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 unit	Dinas Kesehatan	RSUD Setjonegoro, RSI Wonosobo, PKU Muhamadiyah Wonosobo, RSIA Adina

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1300	Dinas Kesehatan	5 orang dokter spesialis kebidanan, 535 orang bidan, 760 orang perawat
		5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 unit	Dinas Kesehatan	• Vaksin tetanus 1.324 Vial (1 vial untuk 10 orang) • Tablet tambah darah (90 tablet x 13.244 ibu hamil) • 13.244 Alat deteksi risiko ibu hamil (alat tes kehamilan, pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan glukoprotein urin) • 13.244 Kartu ibu/ rekam medis ibu • 13.244 Buku KIA
		6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1300	Dinas Kesehatan	5 orang dokter spesialis kebidanan, 535 orang bidan, 760 orang perawat
		7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 unit	Dinas Kesehatan	• 12.480 Formulir partograf • 12.480 Kartu Ibu (rekam medis) • 12.480 Buku KIA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1299	Dinas Kesehatan	4 orang dokter spesialis anak, 535 orang bidan, 760 orang perawat
		9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 unit	Dinas Kesehatan	• 12.446 vial Vaksin Hepatitis B 0 • 12.446 vial Vitamin K1 Injeksi • 12.446 Salep/tetes mata antibiotik • 12.446 Formulir Bayi Baru Lahir • 12.446 Formulir MTBM • 12.446 Buku KIA
		10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1478	Dinas Kesehatan	131 orang dokter, 535 orang bidan, 760 orang perawat, 52 orang Ahli Gizi
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9 unit	Dinas Kesehatan	• 66.631 Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) • 66.631 Formulir DDTK • 66.631 Buku KIA • (Jml bayi 6-11 bulan x 2) Vitamin A Biru (untuk bayi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						6-11 bulan diberikan 2x dalam 1 tahun di bulan Februari dan Agustus) • (Jml anak 1-5th x 2) Vitamin A Merah (untuk bayi 6-11 bulan diberikan 2x dalam 1 tahun di bulan Februari dan Agustus) • 66.631 Vaksin Imunisasi Dasar • 66.631 Vaksin Imunisasi Lanjutan • 66.631 Jarum Suntik dan BHP • 24 set Peralatan Anafilaktik
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	741	Dinas Kesehatan	58 orang dokter , 23 orang dokter gigi , 393 orang bidan, 183 orang perawat, 34 orang ahli gizi, 50 orang tenaga kesehatan masyarakat (SDM Puskesmas)
		13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 unit	Dinas Kesehatan	• 83.811 Buku Rapor Kesehatanku ((untuk siswa SD/MI) • 27.960 Buku Pemantauan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						Kesehatan (untuk siswa pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/ LPKA/ posyandu remaja) • 111.841 Kuesioner skrining kesehatan • 24 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja dalam sekolah • 24 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja diluar sekolah
		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	718	Dinas Kesehatan	58 orang dokter, 393 orang bidan, 183orang perawat, 34 orang ahli gizi, 50 orang tenaga kesehatan masyarakat (SDM Puskesmas)
		15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 unit	Dinas Kesehatan	• 48 Pedoman KIE (untuk puskesmas minimal 2 perpuskesmas) • 262 alat ukur berat badan, 262 alat ukur tinggi badan, 262 alat ukur lingkar perut, 262 tensi meter, 262

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						glukometer, 488.869 tes strip gula darah, 488.869 lancet, 488.869 kapas alkohol, (Kit IVA tes blm punya thn ini baru didata dari provinsi untuk pengajuan) Kit IVA tes untuk wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual beresiko, 10 alat krioterapi (alat untuk penanganan tumor dengan menyeka tumor menggunakan cairan khusus yang mengandung Nitrogen) 1 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	718	Dinas Kesehatan	58 orang dokter, 393 orang bidan, 183 orang perawat, 34 orang ahli gizi, 50 orang tenaga kesehatan masyarakat (SDM Puskesmas)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 unit	Dinas Kesehatan	• 104.670 Strip uji pemeriksaan gula darah, 104.670 strip uji pemeriksaan kolesterol • Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam 104.670 Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) • 104. 670 Buku Kesehatan Lansia
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1480	Dinas Kesehatan	131 orang dokter, 535 orang bidan, 760 orang perawat, 54 orang tenaga kesehatan masyarakat
		19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 unit	Dinas Kesehatan	• 48 Pedoman Pengendalian Hipertensi dan media KIE (minimal 2 perpuskesmas) • 262 Tensimeter

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						1 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1480	Dinas Kesehatan	131 orang dokter, 535 orang bidan, 760 orang perawat, 52 orang ahli gizi, 54 orang tenaga kesehatan masyarakat
		21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 unit	Dinas Kesehatan	262 Glukometer, 5.396 Strip tes gula darah, 5.396 kapas alkohol, 5.396 lancet 1 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 48 Pedoman dan media KIE (minimal 2 perpuskesmas)
		22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28	Dinas Kesehatan	13 dokter terlatih jiwa, 15 perawat terlatih jiwa
		23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 unit	Dinas Kesehatan	24 Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) minimal 1 perpuskesmas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						• kit berisi 2 alat fiksasi (belum ada) • 1 Formulir Pencatatan dan pelaporan • media KIE
		24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1028	Dinas Kesehatan	131 orang dokter, 4 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis paru, 760 orang perawat, 78 orang Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), 54 orang kesehatan masyarakat
		25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 unit	Dinas Kesehatan	• 1.000 media KIE (lembar balik, leaflet, poster, banner) cetak th 2019, th 2020 tidak ada cetak KIE karena revocusing anggaran • 500 kit Reagen Zn TB • 611.460 buah masker jenis rumah tangga dan masker N 95 • 2400 Pot dahak, 325 box kaca slide, BHP (oil emersi,

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						ether alkohol, lampu spirtus/bunsen, ose/lidi, rak pengering • 3800 Catridge tes cepat molekuler • 1 formulir pencatatan dan pelaporan (Aplikasi SITT) • 28 Pedoman/standar operasional prosedur (untuk semua Puskesmas dan RS)
		26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1563	Dinas Kesehatan	131 orang dokter, 4 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang dokter spesialis kulit dan kelamin, 760 orang perawat, 535 orang bidan, 78 orang Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), 54 orang kesehatan masyarakat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			kewenangan kabupaten/kota (m)			kewenangan kabupaten
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
		8	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	54 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	41,2 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	30,35%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		11	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		13	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		15	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	94.499	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	5.698	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	100.197	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ dan Dinas LH	
		20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ dan Dinas LH	
		21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah Domestik	297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ dan Dinas LH	
		22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0,314	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	98,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	37,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/LH	
		27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/LH	
		28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,042	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	180	DPMPSTP	
		32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011
		33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada
		34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	BPPKAD	Tidak ada
		36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4.869	BPPKAD	
		37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	4.869	BPPKAD	
		38	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	999.276	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		39	Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		40	Panjang jembatan yang dibangun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		41	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	23.630	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		42	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		43	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	33.605	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		44	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		45	Panjang jalan yang dipelihara	27.033,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		46	Panjang jembatan yang dipelihara	235,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		47	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		48	Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi/ analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		49	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	421	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		50	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		51	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada	Bagian PBJ	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Bagian PBJ	
		53	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Bagian PBJ	
		54	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang mutakhir secara berskala	Ada	Bagian PBJ	
		55	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tersedia	Bagian Organisasi	Sub Urusan Jasa Konstruksi diampu oleh bidang Bina Program pada DPUPR. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		56	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		58	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi /analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		59	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	DPMPTSP	Tahun 2020 tidak melaksanakan sosialisasi karena adanya pandemic covid tapi pembinaan terus dilakukan antara lain lewat media social, WA maupun Konsultasi secara tatap muka (dengan mematuhi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						protocol kesehatan)
		60	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	DPMPTSP	Data dari NSWI sebanyak 250 IUJK maupun TDUP yang disetujui
		61	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPMPTSP	Dari data NSWI terdapat 4 pengajuan yang terpending dikarenakan belum memenuhi kriteria pengajuan (komitmen belum terpenuhi)
		62	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terjadi kecelakaan kerja
		63	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPMPTSP	Dari data NSWI terdapat 4 pengajuan yang terpending dikarenakan belum memenuhi kriteria pengajuan (komitmen belum terpenuhi)
		64	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	222	DPMPTSP	Daftar usaha terbit per Tahun 2018 sd 2020 dikarenakan masa berlaku iujk 3 tahun

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		65	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	26	DPMPTSP	Data dari Izin Usaha NSWI (sumber data dari OSS) tahun 2020
		66	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	222	DPMPTSP	
		67	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	1571	DPMPTSP	Untuk tahun 2020 tidak ada pembinaan dari kegiatan dengan APBD, namun setiap pengajuan izin badan usaha selalu mendapat pembinaan
		68	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	250	DPMPTSP	Data dari Izin Usaha NSWI
		69	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPMPTSP	Data dari Izin Usaha NSWI
		70	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terjadi kecelakaan kerja
		71	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha dengan segmentasi pasar	0	DPMPTSP	Data dari Izin Usaha NSWI

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	119.471	BPBD	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	61 Rumah	BPBD	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	108 Jiwa	BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	11	BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	38	BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	49	BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
					Kawasan Permukiman	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada
		10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8 rehabilitasi rumah 38 fasilitasi penyediaan rumah
		11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	117	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah target 163 127 belum mendapatkan rehabilitasi dan fasilitasi penyediaan rumah
		12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada
		13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8 rehabilitasi rumah 38 fasilitasi penyediaan rumah
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	117	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah target 163 127 belum mendapatkan rehabilitasi dan fasilitasi penyediaan rumah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Tidak ada Pengadaan tanah yang terkait program relokasi warga
		16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	64,93 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	3.528	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	15,62 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		19	Jumlah rumah di kab/kota	235.231	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		20	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	3.528	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		21	Jumlah rumah tidak layak huni	62.091	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Tidak dihuni

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		23	Rasio rumah dan KK	115,5790	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		24	Jumlah rumah pembangunan baru	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (<i>on site / off site</i>)	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau)	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		32	Jumlah pengembang yang teregistrasi	28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
5	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	32	Satpol PP	Tertanganinya pengaduan laporan trantibum melalui PSC dengan Telp. (02865) 321483 Hp. 08112669001
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3.257	Satpol PP	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	19	Satpol PP	Terlaksananya sidang tipiring sebanyak 21 pelanggaran
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Satpol PP	Jumlah PPNS yang memiliki SKEP di Kabupaten Wonosobo sebanyak 8 orang
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	3	Satpol PP	- 1 Mobil Hilux - 1 Truk - 1 Double Cabin
		7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	BPBD	
		8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	13,78 %	BPBD	
		9	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Tidak ada
		10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (rencana Kontingensi) sampai dinyatakan sah/legal	100 %	BPBD	Dokumen pendukung terlampir
		11	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0,026 %	BPBD	Pelatihan Jitu Pasna
		12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,026 %	BPBD	Pelatihan Jitu Pasna
		13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana	2,64 %	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			prasarana penanggulangan bencana			
		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	2,18 %	BPBD	
		15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 %	BPBD	
		16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	BPBD	
		17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	BPBD	Pusdalops; TRC BPBD; Damkar; Tim Pengawas Prokes, Gugus Tugas COVID-19 Dokumen pendukung terlampir (Dokumen persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana)
		18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	84,75 %	BPBD	Bencana Alam sejumlah 96; Bencana COVID-19 sejumlah 4030
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0	BPBD	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	BPBD	Tidak ada
		21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	BPBD	Tidak ada
		22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0	BPBD	Tidak ada
		23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	4	BPBD	1 Fire Pump Pemadam Kebakaran; 2 Selang Air Pemadam Kebakaran, 1 Pompa Pemadam
		24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	12 Orang	BPBD	
		25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat	Belum ada	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
		26	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	BPBD	
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	9.356	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	27	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.520	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		7	Jumlah rumah singgah/ shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1.149	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	1.354	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	55	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	17.480	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		26	Jumlah korban bencana yang	0	Dinas Sosial,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			menerima pelayanan dukungan psikososial		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel II. 7 Indikator Kinerja Keluaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
7	Tenaga Kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Sesuai	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0,83%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Tidak ada
		4	Persentase penerapan Program PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) dengan kualifikasi klaster	100 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4,68	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		7	Persentase LPK yang terakreditasi	17,78 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	73,33 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		9	Jumlah penganggur yang dilatih	528	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	36,36 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		11	Persentase penyerapan lulusan	12,31 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		12	Lulusan bersertifikat kompetensi	16,85 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	377	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	5,88 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		16	Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	57,72 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	7 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	16,56 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,46 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		23	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		24	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		25	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		27	Jumlah perselisihan PHK	2	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Ada, tapi tidak dilaporkan
		29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0 %	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Penyelesaian secara bipartite
		32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	975	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.740	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	34	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	masih menunggu informasi dari aplikasi wajib lapor
		36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	436	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan perusahaan,

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	436	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	aplikasi bursa kerja .jatengprov.go.id
		40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	377	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdatar	377	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	377	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	48	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	37	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	45	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1.300	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	23	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		12	Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	48	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	20.262,5	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak ada	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	23	DPMPSTP	
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Datar Subyek	0	Kantor Pertanahan Wonosobo	Tidak ada
		3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	0	Disperkimhub	Tidak ada
		4	Dokumen izin membuka tanah	0	Kantor Pertanahan Wonosobo	Tidak ada
		5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Kajian Pemanfaatan Lahan Aset Strategis
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKLH = 66,47 IKA = 49,2; IKU = 89,5; IKL = 53,53	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	Ada kecuali TPST Belum Ada	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	94,32	Dinas Lingkungan Hidup	
		4	Rasio pejabat pengawas LH di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0 %	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dikukuhkan menjadi PPLHD
		5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup	Di Wonosobo tidak ada MHA
		6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup	Di Wonosobo tidak ada MHA
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	6,30	Dinas Lingkungan Hidup	
		8	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	Penerbitan akta perceraian	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3	Penerbitan akta kematian	828	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4	Penyajian data kependudukan	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	9.270	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	236	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Tersedianya dokumen Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Dalam Bentuk Perbup
		2	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Data Pendataan Keluarga
		3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	45,94 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Data Dallap
		5	Jumlah <i>stakeholders</i> / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang aktif dalam pengelolaan program KKBPK	555	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Data Dallap
		6	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Data Faskes yang telah terintegrasi dengan K/O/KB
		7	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	38 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		8	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	0	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	42,87 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Sumber data Laporan Statistik Rutin Laporan Peserta KB PP Pengendalian Lapangan
		10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		11	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	2,95 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Data hasil Pelayanan KB BPJS di Faskes
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpangangkutan tipe C	57,14 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Berdasarkan PM Perhubungan No 132 Tahun 2015
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	47,87 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonimi	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Tidak ada
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	89,91 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		5	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	89,91 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	32,5 %	Diskominfo	13 OPD: Dinsos, PMD, PBJ, Setwan, Bappeda, DPMPTSP, Arpusda, Pendopo Bupati, Pendopo Wabup, Diskominfo, Setda, BPPKAD, Adipura, Korpri
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	32,5 %	Diskominfo	13 OPD: Dinsos, PMD, PBJ, Setwan, Bappeda, DPMPTSP, Arpusda, Pendopo Bupati, Pendopo Wabup, Diskominfo, Setda, BPPKAD, Adipura, Korpri
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Diskominfo	Email dengan nama domain wonosobokab
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor Tahun 2015	100 %	Diskominfo	Website OPD, video conference pada kegiatan perangkat daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %	Diskominfo	Website OPD
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan	52,5 %	Diskominfo	
		7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	Diskominfo	Layanan SPBE 6 (Perencanaan s/d pelaporan, Layanan Pengaduan s/d penutupan, Layanan Lahir s/d mati, Layanan CPNS s/d pensiun, Layanan Sakit s/d Sembuh, Layanan ijin Usaha) semua layanan ada tapi ada yang belum sampai pada tahap akhir proses bisnis
		8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	33,33 %	Diskominfo	Layanan Perijinan (DPMPTSP) dan layanan Lahir s/d Mati (Dinas Dukcapil)
		9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	69,23 %	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	69,23 %	Diskominfo	
		11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100 %	Diskominfo	Semua perangkat daerah sudah menggunakan layanan pusat data untuk aplikasi dan website
		12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100 %	Diskominfo	
		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	97,5 %	Diskominfo	Dari seluruh OPD kecuali Badan Kesbangpol (satu data)
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	40,61 %	Diskominfo	
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	100 %	Diskominfo	Semua perangkat daerah memiliki inovasi pendukung smartcity tapi yang menjadi <i>quickwins</i> baru 6 inovasi
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	41 %	Diskominfo	16 ASN mengikuti pelatihan <i>website</i> perangkat daerah yang diadakan diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						bersertifikat bekerjasama dengan inixindo
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada	Diskominfo	Perbup SPBE
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100 %	Diskominfo	KIM = 45 Kelompok, FK Metra = 12 kelompok
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 %	Diskominfo	
		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	1,99 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29,48 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29,4 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46,6 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,16 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,32 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	13 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	13 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	50 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		12	Persentase koperasi yang diberikandukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	16 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			kabupaten/ kota			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)	7,4 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	7,46 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk usaha	0,11 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,69 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,51 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
18	Penanaman Modal	1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman Modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Konsultasi dilakukan lewat <i>whatsapp</i> dan Tatap Muka dengan menerapkan protokol Kesehatan)
		8	Penerbitan perizinan dan non	Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Total ada 550 SK Izin yang dikeluarkan oleh DPMPSTP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			perizinan penanaman modal		Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Wonosobo
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Kabupaten Wonosobo adalah Rp. 134.475.221.868
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak ada kegiatan pembinaan aparatur yang di danai APBD utk tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk Covid-19.
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Untuk tahun 2020 hanya dilakukan pengumuman lewat Instagram kantor DPMPTSP dan melalui <i>chat whatsapp</i> untuk konsultasi dan LKPM
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melalui website dan Instagram serta pengumuman yang ditempel di area kantor DPMPTSP serta videotron kantor
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	148	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	2.768	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	230	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Terdampak pandemi Covid-19
		5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	539	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		6	Jumlah penyelenggaraan even OR prestasi tingkat daerah	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Event OR di tingkat daerah tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19
20	Stastistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Bappeda	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Diskominfo	Tidak melakukan kegiatan survei statistik sektoral
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi data Wonosobo yang bersumber dari BPS	Diskominfo	Buku Indikator Statistik Pembangunan Kabupaten 2019
		4	Jumlah survei statistik sektoral yang	Belum ada	Diskominfo	Diskominfo pernah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			mendapat rekomendasi dr BPS	rekomendasi		mengajukan rekomendasi tapi belum disetujui BPS karena belum sesuai dengan ketentuan BPS
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Belum ada rekomendasi	Diskominfo	Masih tahap sosialisasi
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0%	Diskominfo	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	10%	Diskominfo	
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Tidak ada	Diskominfo	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100 %	Diskominfo	
		3	Persentase sistem elektronik /asset informasi yang telah diaudit dengan	10,39 %	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			risiko kategori rendah			
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	32,5 %	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	584	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman	307	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	339	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	6 tim ahli cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran,	14 CB ditetapkan.	Dinas Pariwisata dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	ODCB didaftarkan: 219 objek, dihapuskan: 0	Kebudayaan	
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	14 CB ditetapkan. Dihapuskan: 0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	6 CB diteliti, 3 CB direvitalisasi, 19 CB diadaptasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	210 objek, dari total 233 objek diduga cagar budaya dan cagar budaya yang sudah terdata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada
		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6 orang Tim Ahli Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	6 orang Tim Ahli Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	6 orang Tim Ahli Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6 orang Tim Ahli Cagar Budaya, museum belum ada	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	6 orang Tim Ahli Cagar Budaya, museum belum ada	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	41 unit	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum ada
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	17,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		2	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1,96 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,11 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1. HUT Perpustakaan ke 30 th 2020 (Talk Show, Bazar Buku dan rangkaian kegiatan lainnya) 2. Lomba Melukis, 3. Lomba Mars Perpustakaan, 4. Lomba Yel Yel Perpustakaan, 5. Lomba Hafalan Qur'an, 6. Siaran Radio (Tema Literasi di masa pandemi covid - 19 kondisi tatangan dan peluang, 7. Siaran Radion (Tema Strategi Inovasi Perpustakaan Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa), 8. Siaran Radio (Tema Meningkatkan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						Kesadaran Perpustakaan Sekolah), 9. Siaran Radio (Tema Akreditasi Perpustakaan), 10. Siaran Radio (Tema Kerjasama Perpustakaan), 11. Siaran Radio (Tema Membangun Literasi melalui Komunitas).
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	107	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	255	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar Arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	80,74 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui	10,42 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			JIKN			
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	90 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Proses kegiatan pemusnahan Arsip sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2016
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	85 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Perlindungan dan penyelamatan Arsip sudah sesuai dengan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, hanya kurang SOP yang saat ini dalam proses pembahasan baik draf maupun Tim.
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten /Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	10%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Saat ini baru proses inventarisasi dan akan mengirim surat kepada Dinas bersangkutan untuk proses penyelamatan Arsip PD Provinsi yang digabungkan dan atau dibubarkan dan pemekaran Kabupaten /Kota sesuai dengan NSPK.
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip	80%	Dinas Kearsipan dan	Kegiatan Alih Media Arsip

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK		Perpustakaan Daerah	sudah dilaksanakan namun belum tuntas. Saat ini tinggal alih media dari Negatif Film ke Positif dan Soft File melalui scan. Sudah ada Daftar Autentifikasi, Berita Acara Alih Media dan Pernyataan Autentifikasi dari pimpinan Pencipta Arsip. (<i>screen shoot</i> web Arpusda)
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	80%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Kegiatan Pencarian Arsip sudah sesuai dengan Perka ANRI Nomor 18 Tahun 2012. Saat ini juga dalam proses pembuatan Daftar Pencarian Arsip Statis yang lain dan akan dilaksanakan dan Koordinasi dengan yang di perkirakan sebagai Instansi Pencipta Arsip. (seperti dalam screen print terlampir)
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sudah sesuai dengan Perka Nomor 26 Tahun 2016

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						Tentang Pedoman Keterbukaan Arsip Statis untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Penyelidikan dan Penyidikan dan dalam Arsip Tracker sudah ditandai Arsip-arsip yang bersifat tertutup

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel II. 8 Indikator Kinerja Keluaran Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Pilihan						
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	83,33 %	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tempat Pelelangan Ikan tidak ada di Wonosobo, adanya Tempat Pendaratan Ikan. (TPI 1 di Bersole, TPI 2 di Kalibening Desa Sumberejo), TPI 3 Lubang Sewu desa Erorejo, TPI 4 Tritis di Kelurahan Wadaslintang dan TPI 5 desa Kumejing; TPI 6 desa Kaligowong (belum operasional)
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	31	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan	540	Dinas Pangan, Pertanian dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)		Perikanan	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di Produksi	47.106.500	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	106	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	341	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dari 106 destinasi wisata terdapat 93 Toilet, 68 mushola, 19 Ruang rapat, 106 tempat parkir, 55 Gazebo
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	89	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0 Sub Bidang Usaha Daya Tarik Wisata, 0 bidang usaha kawasan pariwisata, 1 bidang usaha jasa transportasi, 38 bidang usaha perjalanan wisata, 11 Bidang usaha jasa makanan dan minuman, 34 Bidang usaha akomodasi, 4 Bidang usaha Hiburan dan rekreasi, 0 Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, 1 bidang usaha

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						jasa informasi pariwisata, 0 bidang usaha jasa konsultasi pariwisata, 0 bidang usaha jasa pramuwisata, 0 bidang usaha tirta, 0 bidang usaha SPA.
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	126	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	9,95 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	38,83 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	12 lokasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	168	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	4.165	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tidak menerbitkan izin usaha pertanian
		4	Persentase prasarana yang Digunakan	100 %	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0 %	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dan DPMPTSP	Kewenangan ada di Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	84,5 %	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Dinas Lingkungan	Tidak ada hutan rakyat di

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
					Hidup	Kabupaten Wonosobo
		4	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Tidak ada	DPMPTSP dan Bagian Perekonomian	
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		2	Persentase penerbitan TDG	100 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	2 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	96,37 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	24 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
31	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPSTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			kabupaten/kota			
		2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	Belum adan, baru akan menyusun naskah akademik di tahun 2021.
		3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	84%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	IUI kecil : 5 IUI menengah : 6
		4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	
		5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Belum dapat mengakses daya SINAS
32	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		2	Jumlah satuan pemukiman	0	Dinas Tenaga Kerja,	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Perindustrian dan Transmigrasi	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel II. 9 Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan	1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	30.515	78,93%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	38.661			
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	85.660	109,85%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	77.978			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	34.271	89,52%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 13-15 Tahun pada kabupaten yang bersangkutan	38.285			
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.950	66,64%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten	2.926			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				yang bersangkutan				
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan	636	0,072	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penduduk di kabupaten/kota	879.124			
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	3	75 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah RS di Kabupaten Kota	4			
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	12.526	94,58 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu hamil di Kabupaten/kota	13.244			
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	12.459	99,83%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	12.480			
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	Jumlah bayi baru lahir yang	12.283	98,69%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			kesehatan bayi baru lahir	mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	12.446			
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	55.974	84,01%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita di kabupaten/kota	66.631			
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	45.496	40,68%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	111.841			
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	153.992	31,50%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	488.869			
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75.215	71,86%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota	104.670			
		10	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.566	15,27%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	272.259			
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan	5.379	99,68%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			standar	kesehatan sesuai standar				
				Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	5.396			
		12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.460	73,59%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	1.984			
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.397	36,82%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	9.225			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	16.469	94,05%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	17.510			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/kota (m)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi kewenangan kabupaten
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota (m)	0			
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting	991	4,71%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	21.050			
		4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota	198.323	92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut	215.568			
		5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang	100.197	39,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD				
				Jumlah rumah di Kabupaten	251.247			
		6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	180	100%	DPMPTSP	
				Jumlah IMB yang berlaku	180			
		7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	576.34	57,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/ kota	999.276			
		8	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat	421	61,55%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				pelatihan operator dan teknis/analisis				
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota	684			
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	248	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada kecelakaan konstruksi
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	248			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	11	8.15%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman BPBD	
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada	135			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				tahun n				
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	38	100%		
				Jumlah total rumah tangga relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	38			
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	11,32	18,6 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Luas kawasan permukiman	60,84			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				kumuh di bawah 10 ha				
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	1795	0,714	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Jumlah total unit rumah kab/kota	251.247			
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	17	56,67%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Data jumlah perumahan yang PSU nya sudah tercatat
				Jumlah unit rumah kab/kota	30			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	33	100%	Satpol PP	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	33			
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan	20	12,27%	Satpol PP	
				Jumlah perda/perkada yang memuat	163			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				sanksi				
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		21.566	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		130	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		4.126	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah	46	100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				+ Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah				
				Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota	46			
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran		45 menit		
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	4.138	24,40%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			panti (indikator SPM)	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
				Populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	16.959			
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	17.480	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	17.480			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				bencana di daerah kab/kota				

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel II. 10 Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	12	46,15%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota	26			
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	4900	1,21%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	405.187			
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	13.569.633,58	3.348,98	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah tenaga kerja	405.187			
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata	221	100	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	kelola kerja yang layak			Transmigrasi	
				Jumlah perusahaan	221			
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	436	25,06	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1.740			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	266.793.696.294	31,81%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
				Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	838.681.806.036			
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	32	0,013%	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	242.614			
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	81	0,018 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
				Jumlah penduduk perempuan	430.972			
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	164.432.477	263,83%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Jumlah kebutuhan pangan	62.323.335,36			
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi	7.919	100 %	DPUPR	
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	7.919			
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1.568	100%	BPPKAD	
				Jumlah kebutuhan	1.568			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				tanah untuk pembangunan fasilitas umum				
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	7.919 Ha	100 %	DPMPTSP dan Kantor Pertanahan Wonosobo	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	7.919 Ha			
		4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	0	0	Kantor Pertanahan Wonosobo	Tidak ada
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	0			
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	0	Kantor Pertanahan Wonosobo	Tidak ada
				Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0	0	Kantor Pertanahan Wonosobo	Tidak ada
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0			
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA30%) + (IKD30%) + (ITH40%)		66,47	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	54.191,80	42,22 %	Dinas Lingkungan Hidup	
				Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	128.352,1			
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota	20	11,36%	Dinas Lingkungan Hidup	
				Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	176			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	712.931	107,18 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	665.144			
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	53.175	22,80 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	233.195			
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	204.950	83,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah usia anak 0-18 tahun	244.780			
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	2	5,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah OPD	39			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan	1	Persentase pengentasan	Jumlah desa yang memenuhi kriteria	2	50	Dinas Sosial, Pemberdayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
	Desa		desa tertinggal	desa berkembang per tahun			Masyarakat dan Desa	
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)		4			
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun	17	10,49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	162			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$		2,29	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/ mCPR</i>)	Jumlah peserta KB aktif modern	122.110	79,19	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	
				Jumlah pasangan usia subur	154.206			
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	16.605	10,76	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah pasangan usia subur	154.206			
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$	92,5 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		2	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	V/C ratio di jalan kabupaten /kota	0,44%		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	13	32,50	Diskominfo	
				Jumlah OPD	40			
		2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	23	67,65	Diskominfo	
				Jumlah layanan publik	34			
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran	678.447	77,17%	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan pemerintah daerah kabupaten/kota	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
				Jumlah penduduk	879.124			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	86	32,09 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Jumlah seluruh koperasi	268			
		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	275	0,51%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	53.952			
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	134.475.221.868 - 199.174.850.855	-32,48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	199.174.850.855			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/kota	2.768	1,60 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	172.803			
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/ kota	16.000	9,25 %	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah pemuda (umur 16-30) di kabupaten/kota	172.803			
		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	40	100 %	Bappeda	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			pembangunan daerah	pembangunan daerah		100 %	Bappeda	
				Jumlah OPD	40			
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	40			
				Jumlah OPD	40			
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	177	27,44 %	Diskominfo	
				Jumlah area penilaian	645			
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	14	6,01 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah cagar budaya yang terdata	233			
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		63,02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Kondisi yang dilaporkan berdasar survei tahun 2019. Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
							Covid-19 layanan perpustakaan tutup selama beberapa bulan sehingga survei tidak dapat dilakukan.
		2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) $\sum_{ALM}^{UPLM} \times 100$	25,74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan	$T = (a + i + s + j)/4$ $T =$ Tingkat ketersediaan arsip $a =$ Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip $i =$ Persentase arsip inaktif yang	72,78	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
			Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip	75,83	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
				hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel II. 11 Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Pilihan							
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	8.996.510,7	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	= 126-1.609	-92,17 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Jumlah wisatawan tahun 1-1	1.609		
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	=808.067-1.668.531	-51,57 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Jumlah	1.668.531		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				wisatawan tahun n-1				
		3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	65.293	7.151,48	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah kamar yang tersedia	913			
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		1.255.109.110	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		2.710.855.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	161.083	577,01 %	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Luas panen	27.917			
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya	1160	49,79	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	2330			
28	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	0	0%	DPMPTSP	Tidak ada
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0			
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	47	48,45 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	97			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		2	Persentase kinerja pupuk	Realisasi	32.205,32	96,31 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				RDKK	33.437			
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	312	0,69 %	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/ kota	45531			
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	11.750-19.031	-38,26	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	19.031			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	Tidak ada
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	11	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	DPMPTSP melakukan pemantauan lewat system OSS dan NSWI. Terdapat pengajuan IUI dan terekam jumlah yang memenuhi komitmen sehingga izin keluar atau masih dalam proses karena masih/ belum dalam
				Jumlah izin yang dikeluarkan	11		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
								tahap pengajuan ataukah dipending berarti permohonan tidak layak untuk disetujui.
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	Tidak ada
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	Tidak ada
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) c. Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: a. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) b. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
32	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel II. 12 Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
33	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	722.185.395.453	35,49	BPPKAD		
				Jumlah APBD	2.034.811.966.163				
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	208.649.963.773	10,25	BPPKAD		
				Jumlah PDRB Non Migas	2.034.811.966.163				
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			3	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan	Jumlah belanja	1.690.404.565.316	83,07	BPPKAD		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
			Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	urusan pemerintahan – <i>transfer expenditures</i>			
				Jumlah belanja APBD	2.034.811.966.163		
		6	Opini laporan keuangan	Opini laporan keuangan	5 Tahun (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 4 Tahun (2016, 2017, 2018, 2019) 1 Tahun (2020)	WDP Dalam Proses WTP	BPPKAD
34	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang Ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Jumlah kontrak keseluruhan	56		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				tahun n				
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	56	15,86	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	353			
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	209.270.000.000	24,95	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
				Total belanja langsung	838.681.806.036			
35	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	1009	105,65%	BKD	
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA	955			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				ke bawah				
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	450	7,14%	BKD	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6299			
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	239	43,111%	BKD	
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	450			
36	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	1.680.398.146.175	0	BPPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
			APBD	Total belanja APBD	2.034.811.966.163			
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	206.778.486.531	0	BPPKAD	
				Total PAD dalam APBD	208.649.963.773			
		3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada		BPPKAD	
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	148.138.414.810	6,76	BPPKAD	
				Total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.190.401.953.214			
37	Transparansi dan Partisipasi	1	Informasi tentang sumber daya yang	Belanja anggaran untuk unit	697.676.598.517	126,76	BPPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
	Publik		tersedia untuk pelayanan	pelayanan dapat diakses di website pemda				
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	550.397.419.098			
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di <i>website</i> pemda	29	100%	BPPKAD	
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci	29			

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun 2020 telah ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo yaitu "Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Kabupaten Pintar (Smart Regency) Untuk Pemantapan Perekonomian Kabupaten Wonosobo. Untuk upaya peningkatan kualitas layanan publik, diperlukan sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak yang terkait, melalui implementasi program dan kegiatan prioritas peningkatan pelayanan publik, guna pencapaian Visi "Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua"

Sehingga dasar dari kebijakan anggaran yang mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien, adalah berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan dari sektor-sektor potensial serta pemanfaatan aset daerah. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan anggaran belanja didasarkan pada money follow program prioritas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ini menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Wonosobo secara terukur sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Wonosobo. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat informasi target dan pengukuran kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Secara rinci hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Target dan Pengukuran Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2020. Sehingga terdapat penyesuaian-penyesuaian target atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Terdapat 44 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD. Indikator yang ditetapkan merupakan hasil dari beberapa indikator program sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja ini didasarkan pada target sasaran strategis yang juga dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Tabel II. 13 Target dan Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian	Target	Capaian	%	Target akhir RPJMD	% Capaian terhadap RPJMD
			2019	2020	2020	Capaian		
1	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/ pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Indeks Demokrasi	80	74	93,6	126.49	75	128.80
2	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Indeks Toleransi	0,87	0,49	0,78	159.18	0,49	159.18
3	Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Indeks Gotong Royong	0,82	0,63	0,798	126.67	0,65	122.77
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Rasa Aman	0,68	0,65	0,81	124.62	0,66	122.73
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	59,04	84	59,04*	70,3	85	69,46

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian	Target	Capaian	%	Target akhir RPJMD	% Capaian terhadap RPJMD
			2019	2020	2020	Capaian		
	daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,81	78	82,02	105.15	80	102,53
6	Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	18.854.448,71	18.634.470,50	18,634,470.50	101,20	29.467.110	64
		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	13.798.836,28	13.316.326,20	13,569.633,58	101,90	16.422.929	82.62
		Nilai Tukar Petani (NTP)	0	115	0*	0	120	0
		Laju Inflasi	2,28	3,09	2,28*	73,78	3	124
		Skor PPH	0	87,2	0	0	0	0
		Pertumbuhan Ekonomi	5,61	5,4	-1,66	-30.74	6,52	-25,46
7	Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, berbudaya dan berdikari.	Indeks Ketahanan Pangan	89	88,6	89*	100,45	90	98,89
8	Meningkatnya daya saing daerah	Produktivitas Total Daerah	0	30,81	0*	0	31,8	0
		PDRB per kapita	23,85	23,5 jt	23,75 jt	101,06	20,42	116,31
		Indeks kapasitas Fiskal	0,968	0,19	1,15	605%	2	57.50

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian	Target	Capaian	%	Target akhir RPJMD	% Capaian terhadap RPJMD
			2019	2020	2020	Capaian		
9	Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	IPM	68,27	68,88	68,22	99.04	69,74	97,82
		Rata-rata Lama Sekolah	6,76	6,92	6,81	98.41%	6,5	104.77
		Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun ke atas	93,37	98.29	99,99	101.73	99,99	100
		Rata-Rata Usia Harapan Hidup	71,6	72,81	71,82	98,64	73	98,08
		Angka Kematian Ibu	66,83	63.34	120,5	9.76	63,18	9,28
		Angka Kematian Bayi	8,24	6.06	9	51.49	7,5	80
		Prevalensi Balita Gizi kurang	2,44	1,27	2,53	50,2	1,1	43,48
		Prevalensi balita gizi buruk	0	0,66	0,24	163,64	0,6	160
		Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar/layak	33,82%	79,86	DTD	-	80,50%	0

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian	Target	Capaian	%	Target akhir RPJMD	% Capaian terhadap RPJMD
			2019	2020	2020	Capaian		
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	44,30%	69,04%	49,79%	71.12%	70%	71,13
10	Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,72	94,97	92.75	97,66	95,01	97,62
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	51,41	47,38	92,75	195,76	47,4	195,68
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	1,72	2.12	2.12	100	2	114
		TFR (Total Fertility Rate)	2,12	2,13	2,13	100	2,1	98,57
		Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	76,51%	91,23%	99,94	109,55	85.16%	117.36

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian	Target	Capaian	%	Target akhir RPJMD	% Capaian terhadap RPJMD
			2019	2020	2020	Capaian		
		Presentase Penduduk Ber KTP	99%	99,40%	100	100,19	99.51	100.08
11	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Indeks Gini	0,34	Lebih dari 0,32	0,34*	106,25	0,34	100
		Indeks Williamson	0,35	Lebih dari 0,32	0,35*	109,37	0,35	100
12	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi	Persentase Angka Kemiskinan	16,63%	13,10%	17,36%	67,48%	11,40%	47.72
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,44	2.96	2.42	118,24	2,9	116,55
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,46	1,015	0.47	153.69	1,01	153.47
13	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,47	4,7	5,37	85.74%	5,25	97.53
		Partisipasi Angkatan Kerja	71,91	75,91	71.26	93,87	74,28	95.93
		Dependency Ratio	51,24	53,2	43,61	118,03	52,58	117,06

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian	Target	Capaian	%	Target akhir RPJMD	% Capaian terhadap RPJMD
			2019	2020	2020	Capaian		
		Tingkat Kesempatan Kerja	96,53	94,8	94,63	99,82	95	99,61
14	Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,76	66,39	66,47	100,12	68,15	97,53
15	Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru /terbarukan	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	100%	100%	100	100	100%	100
16	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Indeks Resiko Bencana	112,94	122	86,06	129,46	75	85,25

2) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Program Pendukung Misi ke-1

Pencapaian indikator-indikator kinerja pada misi 1 "meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" didukung dengan pelaksanaan program-program pada urusan (1) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, (2) kebudayaan, dan (3) pemberdayaan masyarakat dan desa.

Program-program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi pertama, anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 14 Program Pendukung Misi Ke-1, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
A	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.092.039.000	6.971.789.310	86,16
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	3.455.240.000	3.271.941.210	94,70
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	732.110.000	644.623.000	88,05
3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	80.000.000	73.700.000	92,13
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.652.989.000	1.837.247.600	69,25
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	146.700.000	146.500.000	99,86
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.025.000.000	997.777.500	97,34
B	URUSAN KEBUDAYAAN	792.982.890	667.521.465	84,18
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	300.000.000	199.609.875	66,54
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	315.982.890	303.587.600	96,08
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	177.000.000	164.323.990	92,84
C	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.878.152.200,00	20.154.738.337,00	92,12
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	20.961.602.200	19.294.164.469	92,05

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	916.550.000	860.573.868	93,89
	JUMLAH	30.763.174.090,00	27.794.049.112,00	90,35

b. Program Pendukung Misi ke-2

Pencapaian Misi ke-2 "Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah".

Program-program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ke-2, anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 15 Program Pendukung Misi Ke-2, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
A	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	90.986.007.153	78.284.442.197	86,04
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65.427.748.623	55.561.820.403	84,92
2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	927.800.000	830.058.361	89,47
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.735.909.930	16.251.860.483	91,63
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000	134.316.110	89,54
5	Program Penataan Kelembagaan	305.000.000	279.312.500	91,58
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4.403.888.600	3.781.006.919	85,86
7	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1.244.460.000	818.779.354	65,79
8	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	40.000.000	30.500.000	76,25
9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	751.200.000	596.788.067	79,44
B	URUSAN PENGAWASAN	603.500.000	471.995.608	78,21
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	275.000.000	229.631.758	83,50

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	KDH			
2	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	253.500.000	187.796.500	74,08
3	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	75.000.000	54.567.350	72,76
C	URUSAN PERENCANAAN	2.614.976.500	2.113.390.978	80,82
1	Program perencanaan pembangunan daerah	1.828.086.000	1.621.547.990	88,70
2	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	100.000.000	86.892.100	86,89
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	111.890.500	49.370.000	44,12
4	Program Perencanaan Sosial Budaya	210.000.000	112.172.971	53,42
5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	280.000.000	211.638.917	75,59
6	Program Kerjasama Pembangunan	85.000.000	31.769.000	37,38
D	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	372.500.000	310.104.000	83,25
1	Program Penelitian dan Pengembangan	372.500.000	310.104.000	83,25
E	URUSAN KEUANGAN	5.281.518.200	4.511.305.399	85,42
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.488.750.000	2.160.660.888	86,82
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah	2.190.128.200	1.813.910.651	82,82
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	602.640.000	536.733.860	89,06
F	URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.662.733.000	3.664.866.257	78,60
1	Program peningkatan disiplin aparatur	816.496.500	720.776.006	88,28
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.060.000.000	949.603.712	89,59
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.786.236.500	1.994.486.539	71,58

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
G	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.404.447.000	4.175.541.893	94,80
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	592.313.500	569.382.731	96,13
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	24.499.500	24.379.500	99,51
3	Program kerjasama informasi dengan mas media	138.534.000	138.534.000	100,00
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	3.579.100.000	3.389.886.612	94,71
5	Program pengembangan data/informasi	70.000.000	53.359.050	76,23
H	URUSAN STATISTIK	3.580.000	3.580.000	100,00
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	3.580.000	3.580.000	100,00
I	URUSAN PERSANDIAN	20.000.000	11.153.400	55,77
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	20.000.000	11.153.400	55,77
J	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.064.740.215	900.257.995	84,55
1	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	404.740.215	307.926.075	76,08
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	660.000.000	592.331.920	89,75
K	URUSAN PERTANAHAN	900.000.000	601.350.150	66,81668
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	780.000.000	526.750.650	67,53
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	120.000.000	74.599.500	62,17
L	URUSAN KEARSIPAN	265.000.000	262.472.800	99,05
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	50.000.000	48.700.000	97,40
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	215.000.000	213.772.800	99,43
	JUMLAH	111.179.002.068	95.310.460.677	85,73

c. Program Pendukung Misi ke-3

Pencapaian Misi ke-3 “Meningkatkan kemandirian daerah” berdasarkan penetapan sembilan indikator kinerja sebagaimana telah tersebut di atas, yaitu:

Program-program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ke-3, anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 16 Program Pendukung Misi Ke-3, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
A	URUSAN PANGAN	156.200.000	154.903.072	99,17
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100.000.000	99.627.872	99,63
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	56.200.000	55.275.200	98,35
B	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.514.858.000	1.462.609.318	96,55
1	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	185.000.000	178.064.700	96,25
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	782.500.000	737.827.550	94,29
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	417.358.000	416.958.000	99,90
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	130.000.000	129.759.068	99,81
C	URUSAN PENANAMAN MODAL	207.000.000	180.927.650	87,40
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	189.000.000	162.927.650	86,21
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	18.000.000	18.000.000	100,00
D	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	915.000.000	878.552.320	96,02
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	220.000.000	188.585.000	85,72
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	470.000.000	468.372.320	99,65
3	Program Peningkatan Sarana dan	225.000.000	221.595.000	98,49

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Prasarana Olah Raga			
E	URUSAN PERTANIAN	4.178.631.600	3.192.359.662	76,40
1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	35.000.000	0	0,00
2	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	123.260.000	98.428.000	79,85
3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.813.796.000	2.696.059.362	95,82
4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	125.000.000	123.652.500	98,92
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	19.560.000	18.853.800	96,39
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.062.015.600	255.366.000	24,05
F	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.055.542.000	1.866.955.300	90,83
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.055.542.000	1.866.955.300	90,83
G	URUSAN PARIWISATA	17.438.555.200	4.078.159.623	23,39
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	161.500.000	159.778.380	98,93
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	16.137.961.200	2.822.588.363	17,49
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.139.094.000	1.095.792.880	96,20
H	URUSAN PERDAGANGAN	68.671.216.000	66.245.547.641	96,47
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	250.000.000	231.064.920	92,43
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	70.000.000	67.314.900	96,16
3	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	100.000.000	95.742.000	95,74
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi	68.221.216.000	65.833.239.321	96,50
5	Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM)	30.000.000	18.186.500	60,62
I	URUSAN PERPUSTAKAAN	562.760.600	560.874.600	99,66

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	562.760.600	560.874.600	99,66
J	URUSAN PERINDUSTRIAN	329.023.655	327.175.980	99,44
1	Program Peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi	1.425.705	1.425.705	100,00
2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.966.125	1.966.125	100,00
3	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	225.631.825	223.912.150	99,24
4	Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	100.000.000	99.872.000	99,87
	JUMLAH	96.028.787.055	78.948.065.166	82,21

d. Program Pendukung Misi ke-4

Capaian Kinerja Indikator Misi 4 " Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata"

Dalam mendukung pencapaian misi ke-4 melalui penetapan 25 indikator sasaran sebagaimana uraian di atas, telah dilaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 17 Program Pendukung Misi Ke-4, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
A	URUSAN PENDIDIKAN	162.430.078.052	90.181.183.290	55,52
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.373.480.000	19.247.462.300	99,35
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	35.487.867.000	31.219.689.850	87,97
3	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	35.000.000	35.000.000	100,00
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	878.280.670	872.697.670	99,36
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.929.036.000	2.887.688.854	98,59
6	Program Pendidikan Non Formal	2.716.300.000	2.461.318.800	90,61

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
7	Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)	101.010.114.382	33.457.325.816	33,12
B	URUSAN KESEHATAN	229.489.252.651	178.447.404.985	77,76
1	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	147.615.675	33.755.675	22,87
2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.512.420.000	6.422.586.927	98,62
3	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	15.200.000.000	14.234.647.647	93,65
4	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	434.142.000	411.728.459	94,84
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	767.084.450	749.064.077	97,65
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	141.125.120.026	95.925.365.785	67,97
7	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	141.626.000	102.085.075	72,08
8	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	84.446.000	82.973.300	98,26
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	427.502.000	362.718.688	84,85
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	7.461.590.000	11.272.806.326	151,08
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22.326.348.500	19.506.810.025	87,37
12	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	14.132.656.000	11.834.485.835	83,74
13	Program Pencegahan Penyakit tidak menular	120.500.000	115.650.000	95,98
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	993.243.000	457.198.317	46,03
15	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	9.153.406.000	7.167.511.715	78,30
16	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	10.455.553.000	9.762.017.134	93,37

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
17	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	6.000.000	6.000.000	100,00
C	URUSAN SOSIAL	16.181.995.000	14.930.182.095	92,26
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.545.000.000	956.224.770	61,89
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	12.718.495.000	12.507.092.684	98,34
3	Program pembinaan anak terlantar	125.000.000	108.251.500	86,60
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	330.000.000	264.098.500	80,03
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	40.000.000	18.962.500	47,41
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.423.500.000	1.075.552.141	75,56
D	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.455.903.560	9.572.873.175	91,55
1	Program Pengembangan Perumahan	10.455.903.560	9.572.873.175	91,55
E	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81.219.717.103	68.124.491.420	83,88
1	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	535.064.003	519.600.303	97,11
2	Program pembangunan jalan dan jembatan	45.941.915.000	34.270.286.560	74,59
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	26.761.539.000	25.618.521.773	95,73
4	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	6.778.760.000	6.675.581.699	98,48
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	509.519.600	488.867.085	
6	Program Perencanaan Tata Ruang	674.919.500	533.634.000	79,07
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	18.000.000	18.000.000	100,00
F	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.271.836.400	4.691.424.054	88,99

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	61.020.000	54.208.000	88,84
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	356.939.400	352.715.081	98,82
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	137.396.100	137.396.100	100,00
4	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	4.716.480.900	4.147.104.873	87,93
G	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.681.036.500	5.406.776.185	80,93
1	Program Keluarga Berencana	6.295.292.000	5.106.801.685	81,12
2	Program pemberdayaan Keluarga	80.000.000	79.400.000	99,25
3	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	30.000.000	25.500.000	85,00
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	94.180.000	93.540.000	99,32
5	Program pelayanan kontrasepsi	91.564.500	77.264.500	84,38
6	Program Pengendalian Penduduk	90.000.000	24.270.000	26,97
H	URUSAN TENAGA KERJA	1.127.557.707	1.121.690.236	99,48
1	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64.855.000	63.005.000	97,15
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	733.866.507	731.417.036	99,67
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50.000.000	49.200.000	98,40
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	278.836.200	278.068.200	99,72
I	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	175.000.000	174.513.000	99,72
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	175.000.000	174.513.000	99,72
J	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.584.183.850	3.262.781.820	91,03

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.584.183.850	3.262.781.820	91,03
K	URUSAN PERHUBUNGAN	4.927.568.300	4.848.670.024	98,40
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	108.887.300	102.852.300	94,46
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	411.348.550	400.787.190	97,43
3	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	2.353.570.700	2.302.803.700	97,84
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.053.761.750	2.042.226.834	99,44
	JUMLAH	521.544.129.123	380.761.990.284	73,01

e. Program Pendukung Misi ke-5

Capaian Kinerja Indikator Misi 5 "Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah"

Dalam mendukung pencapaian misi ke-5 melalui penetapan indikator sasaran sebagaimana uraian di atas, telah dilaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 18 Program Pendukung Misi Ke-5, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
A	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.240.987.150	62.902.042.009	92,18
1	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.186.000.000	1.142.844.325	96,36
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.837.076.000	20.473.447.720	93,76
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	43.587.286.150	40.056.444.134	91,90
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.530.625.000	1.229.305.830	80,31
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	100.000.000	0	0,00

B	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	4.912.795.550	4.495.834.884	91,51
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.858.295.550	2.527.397.843	88,42
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.140.000.000	1.099.845.141	96,48
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	100,00
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	850.000.000	804.091.900	94,60
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup	14.500.000	14.500.000	100,00
C	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.012.931.000	5.089.048.595	84,64
1	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	6.012.931.000	5.089.048.595	84,64
	JUMLAH	79.166.713.700	72.486.925.488	91,56

3) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi anggaran dengan membandingkan tingkat pencapaian sasaran pada masing-masing Misi dengan realisasi anggaran program pada masing-masing misi. Terdapat 16 Sasaran dan 43 Indikator Kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Tabel II. 19 Efisiensi Anggaran Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Misi	Jumlah Indikator	Capaian 2020			Anggaran		
			Kriteria	Jumlah	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	4	Sangat Tinggi	4	100	30.763.174.090	27.794.049.112	90,35
			Tinggi	0				
			Sedang	0				
			Rendah	0				
			Sangat Rendah	0				
2	Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan	2	Sangat Tinggi	1	50	111.179.002.068	95.310.460.677	85,73
			Tinggi	0				
			Sedang	1	50			
			Rendah	0				

No	Misi	Jumlah Indikator	Capaian 2020			Anggaran		
			Kriteria	Jumlah	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
			Sangat Rendah	0				
3	Meningkatkan kemandirian daerah	9	Sangat Tinggi	5	44,45	96.028.787.055	78.948.065.166	82,21
			Tinggi	0				
			Sedang	1	11,11			
			Rendah	1	11,11			
			Sangat Rendah	3	33,33			
4	Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata	25	Sangat Tinggi	18	72	521.544.129.123	380.761.990.284	73,01
			Tinggi	2	8			
			Sedang	2	8			
			Rendah	0				
			Sangat Rendah	3	12			
5	Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah	3	Sangat Tinggi	3	100	79.166.713.700	72.486.925.488	91,56
			Tinggi	0				
			Sedang	0				
			Rendah	0				
			Sangat Rendah	0				

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda, 2021

a. Efisiensi Anggaran Misi ke-1

Alokasi anggaran untuk misi ke-1 sebesar Rp. 30.763.174.090,- atau 3,66 % dari total alokasi APBD Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 838.681.860.036,-. Pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp. 27.794.049.112,- atau 90,35% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.969.124.978 ,- Pada misi ke-1 terdapat indikator kinerja sasaran dengan pencapaian: 4 indikator kategori sangat tinggi. Apabila dibandingkan efisiensi anggaran dengan pencapaian kinerja sasaran terhitung masih relevan meskipun bukan indikasi positif pencapaian sasaran.

b. Efisiensi Anggaran Misi ke-2

Alokasi anggaran untuk misi ke-2 sebesar Rp.111.179.002.068,- atau 13,25 % dari total alokasi APBD Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 838.681.860.036,-. Pada pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp.93.310.460.677,- atau 85,73% dengan sisa anggaran sebesar Rp.17.868.541.391,- Pada misi ke-2 terdapat indikator kinerja sasaran dengan pencapaian: 1 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori sedang. Apabila dibandingkan efisiensi anggaran dengan pencapaian kinerja sasaran terhitung masih relevan, meskipun terlihat perlu perbaikan pada pencapaian indikator kategori sedang.

c. Efisiensi Anggaran Misi ke-3

Alokasi anggaran untuk misi ke-3 sebesar Rp. 96.028.787.055,- atau 11,45% dari total alokasi APBD Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 838.681.860.036,-. Pada pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp. 78.948.065.166,- atau 82,21% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 17.080.721.889,-.

Pada misi ke-3 terdapat indikator kinerja sasaran dengan pencapaian: 5 indikator kategori sangat tinggi, 1 indikator kategori sedang, 1 indikator rendah dan 3 indikator sangat rendah. Apabila dibandingkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 17.080.721.889,- dengan pencapaian kinerja sasaran, terhitung masih relevan kinerja program dan kegiatan pada misi ke-3 ini, meskipun terlihat perlu perbaikan pada pencapaian indikator kategori sangat rendah.

d. Efisiensi Anggaran Misi ke-4

Alokasi anggaran untuk misi ke-4 sebesar Rp. 521.544.129.123,- atau 62,20% dari total alokasi APBD Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 838.681.860.036,-. Pada pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp. 360.761.990.284,- atau 73,01% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 160.782.138.839,-.

Indikator pada misi ke-4 ini secara rinci pencapaiannya terdapat 18 kategori sangat tinggi, 2 indikator kategori tinggi, 2 indikator kategori sedang, dan 3 indikator kategori sangat rendah. Efisiensi anggaran pada misi ke-4 sebesar Rp. 160.782.138.839,-. Apabila dibandingkan dengan dengan pencapaian indikator sasarannya, efisiensi anggaran pada misi ke-4 ini relevan dengan kinerja programnya, meskipun terdapat catatan bahwa terdapat 1 indikator dengan capaian sangat rendah dan sedang.

e. Efisiensi Anggaran Misi ke-5

Alokasi anggaran untuk misi ke-5 sebesar Rp. 79.166.713.700,- atau 9,44% dari total alokasi APBD Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 838.681.860.036,-. Pada pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp. 72.486.925.488,- atau 91,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.679.788.212,-.

Pada misi ke-5 terdapat indikator kinerja sasaran dengan pencapaian: 3 indikator kategori sangat tinggi. Sehingga meskipun terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.679.788.212,-, Apabila dibandingkan efisiensi anggaran dengan pencapaian kinerja sasaran terhitung masih relevan meskipun bukan indikasi positif pencapaian sasaran.